

Kesantunan Berbahasa dalam Retorika Politik: Register Bahasa Mahyeldi dan Epyardi dalam Debat Publik Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada Kanal Youtube KPU Sumbar

Yumelta Novita^{a*}, Syofiani^b, Hasnul Fikri^c

a,b,c,d Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Bung Hatta,
email: yumelta976@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 25 Januari 2026

Revised : 19 Februari 2026

Accepted : 25 Februari 2026

Keywords:

linguistic politeness, political debate, Geoffrey Leech's politeness maksims, kato nan ampek

Kata Kunci:

kesantunan berbahasa, debat politik, maksim Geoffrey Leech, kato nan ampek

DOI: 10.62335

ABSTRACT

Language variation in the political sphere gives rise to registers shaped by the speakers' styles, which often neglect principles of politeness. This study aims to analyze the politeness strategies employed by Mahyeldi and Epyardi Asda in the 2024 West Sumatra Gubernatorial Public Debate based on Geoffrey Leech's (1983) Politeness Principle and the concept of kato nan ampek (Navis, 1986). This research adopts a qualitative approach using pragmatic discourse analysis. The data consist of transcriptions of both candidates' utterances, which were examined according to Leech's six politeness maxims and the values of kato nan ampek. Data collection techniques included observation, transcription, note-taking, data classification, documentation, and data inventory. The data were analyzed through reduction, data presentation, contextual analysis, and conclusion drawing. The findings reveal that out of 37 analyzed utterances, only 9 complied with Geoffrey Leech's politeness principles, while 28 violated them. Compliance was predominantly demonstrated by Mahyeldi, particularly in the tact maxim, whereas Epyardi Asda showed no compliance and more frequently violated the agreement, tact, and modesty maxims. Based on the kato nan ampek framework, Mahyeldi tended to use polite forms in kato mandaki and kato malereang, while Epyardi Asda more frequently violated kato mandaki through derogatory insinuations. These differences have implications for the construction of public image and societal perception, indicating that linguistic politeness plays a significant role in political communication.

ABSTRAK

Keragaman bahasa dalam ranah politik melahirkan register yang dipengaruhi gaya tutur penuturnya dan sering kali mengabaikan prinsip kesantunan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesantunan berbahasa Mahyeldi dan Epyardi Asda dalam debat publik pemilihan

Gubernur Sumatera Barat 2024 berdasarkan teori kesantunan Geoffrey Leech (1983) dan konsep *kato nan ampek* (Navis, 1986). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana pragmatik. Data berupa transkripsi tuturan kedua kandidat yang dianalisis berdasarkan enam maksim kesantunan Leech dan nilai *kato nan ampek*. Teknik pengumpulan data penelitian melalui teknik simak, transkripsi, pencatatan, klasifikasi data, dokumentasi, dan inventaris data. Analisis data melalui reduksi, penyajian data, analisis konstektual dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 37 tuturan yang dianalisis, hanya 9 tuturan yang mematuhi prinsip kesantunan Geoffrey Leech dan 28 tuturan melanggar, dengan kepatuhan didominasi oleh Mahyeldi terutama pada maksim kebijaksanaan, sedangkan Epyardi Asda tidak menunjukkan kepatuhan dan lebih banyak melanggar maksim pemufakatan, kebijaksanaan, dan kerendahan hati. Berdasarkan konsep *kato nan ampek*, Mahyeldi cenderung santun dalam *kato mandaki* dan *kato malereang*, sementara Epyardi Asda lebih banyak melanggar, khususnya pada *kato mandaki* melalui sindiran yang merendahkan. Perbedaan ini berimplikasi pada pembentukan citra dan persepsi publik, sehingga kesantunan berbahasa menjadi faktor penting dalam komunikasi politik

LATAR BELAKANG

Masyarakat Indonesia dikenal dengan keragaman bahasa dan budaya yang membentuk identitas setiap komunitas tutur. Dalam ranah politik, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk membangun citra, memengaruhi opini publik, dan mempertahankan kekuasaan. Karena itu, kajian pragmatik, khususnya kesantunan berbahasa, relevan untuk menelaah bagaimana aktor politik menyampaikan pesan secara efektif tanpa mengabaikan norma sosial. Teori kesantunan dari Penelope Brown dan Stephen C. Levinson (1987) menekankan pentingnya strategi menjaga “wajah” (face), sedangkan prinsip kesantunan menurut Geoffrey Leech memberikan kerangka analitis untuk memahami upaya meminimalkan konflik dalam interaksi, termasuk pada debat politik yang kompetitif.

Debat publik Pilgub Sumatera Barat 2024 yang disiarkan melalui kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menghadirkan ruang strategis untuk mengamati praktik kesantunan dalam komunikasi politik. Dalam forum tersebut, Mahyeldi dan Epyardi Asda menampilkan perbedaan gaya komunikasi dan pilihan register sesuai latar belakang serta pendekatan politik masing-masing. Strategi berbahasa keduanya juga dipengaruhi konteks budaya Minangkabau melalui konsep *kato nan ampek*—*kato mandaki*, *kato manurun*, *kato malereang*, dan *kato mandata*—yang mengatur tata tutur berdasarkan relasi sosial dan situasi komunikasi. Nilai lokal ini menempatkan bahasa sebagai cerminan budi pekerti dan sarana menjaga harmoni sosial dalam ruang publik.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa debat politik memuat pematuhan sekaligus pelanggaran prinsip kesantunan, baik melalui strategi positif maupun negatif, bergantung pada dinamika

persaingan dan isu yang dibahas. Namun, kajian yang mengintegrasikan teori kesantunan pragmatik dengan kearifan lokal Minangkabau dalam konteks debat Pilgub Sumatera Barat masih terbatas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan masalah: (1) strategi kesantunan yang digunakan kedua kandidat; (2) perbedaan register bahasa dalam penyampaian argumentasi; (3) faktor-faktor yang memengaruhi variasi strategi dan register; serta (4) keterkaitannya dengan citra diri, tujuan retorik, dan konteks sosial-politik debat.

Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip kesantunan berbahasa yang digunakan Mahyeldi dan Epyardi Asda, mendeskripsikan keterkaitannya dengan norma tutur Minangkabau, serta menjelaskan dampaknya terhadap pembentukan citra politik. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi referensi penguatan pendidikan karakter di sekolah, khususnya dalam pembelajaran debat dan pragmatik; menjadi bahan ajar bagi guru untuk menganalisis kesantunan dan *kato nan ampek*; membantu siswa memahami pentingnya komunikasi santun sebagai cerminan karakter; serta menjadi rujukan bagi peneliti lain dalam pengembangan kajian bahasa, budaya, dan politik.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Minangkabau Sebagai Masyarakat Bahasa

Konsep masyarakat bahasa merujuk pada sekelompok penutur yang menggunakan sistem kebahasaan yang sama serta berbagi norma dalam berkomunikasi. Leonard Bloomfield (1933) memandang masyarakat bahasa sebagai komunitas yang menggunakan sistem tanda yang relatif seragam, sementara John Lyons (1970) menegaskan bahwa masyarakat bahasa merupakan satuan dasar kajian linguistik yang ditandai oleh penggunaan bahasa atau dialek yang sama dalam interaksi sehari-hari. Gagasan tentang komunitas tutur yang homogen juga diperkenalkan oleh Noam Chomsky (1965) melalui konsep *completely homogeneous speech community* dalam kerangka linguistik generatif. Dalam perspektif sosiolinguistik, William Labov menambahkan bahwa masyarakat bahasa tidak hanya diikat oleh sistem linguistik, tetapi juga oleh norma dan sikap sosial terhadap penggunaan bahasa. Dengan demikian, bahasa berkembang seiring dinamika sejarah, budaya, dan politik, serta merefleksikan struktur sosial komunitas penuturnya.

Dalam konteks Minangkabau, masyarakat bahasa memiliki keterkaitan erat dengan adat dan nilai religius yang terangkum dalam falsafah “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah.” Norma kesantunan diwujudkan melalui sistem *kato nan ampek*—*kato mandaki*, *kato malereang*, *kato mandata*, dan *kato manurun*—yang mengatur pilihan tutur berdasarkan usia, status sosial, dan situasi komunikasi. Struktur sosial yang hierarkis tercermin dalam praktik berbahasa yang menekankan penghormatan kepada datuak, penghulu, dan mamak sebagai figur otoritatif. Tuturan sering disampaikan secara tidak langsung dan menggunakan kiasan untuk menjaga perasaan serta harmoni sosial. Sejalan dengan pandangan Robert Le Page dan Richard A. Hudson, identitas kebahasaan individu dibentuk melalui afiliasi sosial dan proses penyesuaian diri terhadap norma kelompok. Oleh karena itu, kesantunan berbahasa dalam masyarakat Minangkabau menjadi kerangka normatif yang memengaruhi pilihan strategi tutur, termasuk dalam konteks komunikasi

politik.

Kajian Bahasa Politik

Bahasa politik merupakan bidang kajian linguistik yang menyoroti bahasa sebagai sarana utama dalam aktivitas politik. Menurut Paul Chilton (2004), politik tidak dapat dipisahkan dari bahasa karena seluruh praktik politik berlangsung melalui interaksi verbal. Sejalan dengan itu, Norman Fairclough (1995) menegaskan bahwa bahasa politik tidak bersifat netral, melainkan sarat kepentingan ideologis dan relasi kekuasaan. Dalam konteks debat, bahasa menjadi instrumen strategis untuk menyampaikan argumen, membangun citra, menyerang lawan secara terselubung, serta membujuk audiens. Penggunaan register dan strategi retorika disesuaikan dengan situasi, karakter pemilih, dan tujuan politik, sehingga bahasa berfungsi bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga perangkat legitimasi dan kontrol wacana.

Di Indonesia, kompleksitas bahasa politik dipengaruhi oleh keragaman bahasa (Indonesia, daerah, dan asing), kualitas pengguna, serta ranah pemakaiannya yang diatur secara konstitusional. Butir ketiga Sumpah Pemuda dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara, yang sekaligus menjadi landasan politik kebahasaan nasional. Dalam praktiknya, pola bahasa politik kerap memanfaatkan retorika, eufemisme, ambiguitas terkontrol, serta strategi kesantunan untuk memengaruhi opini publik. Konsep *language games* menunjukkan bahwa bahasa politik dimainkan secara strategis—memilih istilah, mengatur nada, bahkan menyamarkan makna—demi mencapai tujuan ideologis. Dengan demikian, bahasa politik merefleksikan dinamika sosial, ideologi, dan relasi kekuasaan dalam masyarakat.

Kesantunan Berbahasa

Kesantunan berbahasa merupakan aspek fundamental dalam interaksi komunikasi karena berkaitan dengan etika, norma sosial, dan penghormatan terhadap mitra tutur. Dalam kajian pragmatik, kesantunan tidak hanya ditentukan oleh pilihan kata, tetapi juga oleh konteks, relasi sosial, serta strategi penyampaian pesan. Melalui perspektif pragmatik, bahasa dipahami sebagai tindakan sosial yang mengandung maksud tersirat, daya persuasi, dan upaya menjaga keharmonisan hubungan. Dalam ranah politik, kesantunan menjadi semakin penting karena tuturan tidak sekadar menyampaikan informasi, melainkan juga membangun citra, memengaruhi opini publik, dan merepresentasikan karakter penutur di hadapan masyarakat.

Secara teoretis, Geoffrey Leech (1983) merumuskan enam maksim kesantunan, yaitu maksim kebijaksanaan (*tact*), kedermawanan (*generosity*), penghargaan (*approbation*), kesederhanaan atau kerendahan hati (*modesty*), kesepakatan (*agreement*), dan simpati (*sympathy*). Keenam maksim tersebut bertujuan meminimalkan kerugian bagi orang lain dan memaksimalkan penghargaan serta empati dalam interaksi. Prinsip ini relevan dalam komunikasi politik yang sarat kepentingan dan kompetisi wacana, karena kesantunan berfungsi sebagai strategi retorik untuk menjaga “wajah” sosial sekaligus membangun legitimasi moral. Dengan demikian, kepatuhan atau pelanggaran terhadap maksim-maksim tersebut dapat menjadi indikator bagaimana seorang penutur mengelola relasi kekuasaan dan citra diri melalui bahasa.

Dalam konteks budaya Minangkabau, kesantunan tidak hanya diukur melalui teori pragmatik universal, tetapi juga melalui nilai lokal yang dikenal sebagai *kato nan ampek*, yakni *kato mandaki*, *kato manurun*, *kato mandata*, dan *kato malereang*. Konsep ini mengatur pilihan bahasa berdasarkan usia, status sosial, dan situasi komunikasi, sehingga setiap tuturan harus disesuaikan dengan hierarki dan norma adat. Sebagaimana dijelaskan oleh A. A. Navis, *kato nan ampek* merupakan pedoman etika bertutur yang mencerminkan nilai moral, adat, dan agama dalam masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu, analisis kesantunan dalam konteks Sumatera Barat perlu mengintegrasikan enam maksim Leech dengan *kato nan ampek* agar diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang strategi berbahasa dalam praktik komunikasi politik.

Register Bahasa

Dalam kajian sosiolinguistik, variasi bahasa meliputi dialek, idiolek, sosiolek, kronolek, gaya bahasa, dan register. Register merupakan variasi bahasa yang digunakan sesuai konteks situasi, bidang, dan tujuan komunikasi, yang ditandai oleh pemilihan kosakata, gaya, serta bentuk bahasa tertentu agar pesan tersampaikan secara tepat dan efektif. Berbeda dengan dialek yang berkaitan dengan siapa penuturnya dan dari mana asalnya, register berhubungan dengan untuk keperluan apa bahasa itu digunakan. Konsep ini diperkenalkan oleh M. A. K. Halliday yang membagi register berdasarkan tiga variabel konteks, yaitu field (bidang), tenor (pelibat), dan mode (sarana). Sejalan dengan itu, Charles A. Ferguson, Ronald Wardhaugh, Abdul Chaer, dan Harimurti Kridalaksana menjelaskan bahwa register muncul karena perbedaan situasi sosial, profesi, dan lingkungan kegiatan, sehingga setiap bidang memiliki istilah serta pola bahasa khas yang membedakannya dari bahasa sehari-hari.

Register dapat dibedakan berdasarkan bidang dan situasi komunikasi, seperti register akademik yang formal dan lugas, register profesi (hukum, kedokteran, militer, teknologi) yang sarat istilah teknis, serta register sosial yang berkembang dalam komunitas tertentu. Selain itu, terdapat perbedaan antara register formal dan informal sesuai tingkat keseriusan situasi. Dalam kehidupan modern, seseorang dapat menggunakan lebih dari satu dialek sekaligus berbagai register sesuai aktivitasnya, termasuk dalam debat politik. Dalam konteks tersebut, pilihan register mencerminkan strategi komunikasi, karakter, dan latar belakang penutur; ada kandidat yang menggunakan register formal untuk menampilkan otoritas, sementara yang lain memilih gaya lebih santai untuk membangun kedekatan dengan publik. Dengan demikian, register berfungsi sebagai sarana penyesuaian bahasa terhadap konteks agar komunikasi berlangsung efektif dan sesuai tujuan sosialnya.

Retorika Politik

Retorika berasal dari kata *rhetoric* (Inggris) dan *rhetorica* (Latin) yang berarti ilmu berbicara. Sebagai disiplin, retorika bersifat rasional, empiris, umum, dan akumulatif karena menuntut penyampaian gagasan yang logis, berbasis fakta, terbuka, serta berkembang dari waktu ke waktu. Retorika dapat dipahami secara sempit sebagai keterampilan berbicara, dan secara luas sebagai kemampuan menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan, secara efektif dan persuasif. Hakikat retorika terletak pada kemampuan memilih ungkapan yang paling tepat agar pesan dipahami dan diterima audiens. Unsur pendukungnya meliputi penguasaan bahasa, etika dan nilai moral,

penalaran logis, serta pengetahuan yang memadai agar pembicara memiliki kredibilitas dan daya pengaruh.

Perkembangan retorika bermula di Yunani kuno, khususnya di Syracuse, Sisilia, ketika kebutuhan membela hak di pengadilan mendorong lahirnya kajian sistematis tentang seni berbicara oleh Corax. Pemikiran retorika kemudian dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Gorgias yang menekankan kekuatan bahasa dan bunyi, Socrates yang memandang retorika sebagai sarana mencari kebenaran melalui dialog, serta Aristotle yang meletakkan dasar ilmiah retorika dalam karyanya *De Arte Rhetorica*. Aristoteles menegaskan bahwa retorika berkaitan erat dengan logika dan pembuktian maksud pembicaraan, serta merumuskan Lima Hukum Retorika, yaitu *Invention*, *Dispositio*, *Elocutio*, *Memoria*, dan *Pronuntiatio*, yang hingga kini menjadi landasan dalam penyusunan pidato dan komunikasi persuasif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana berperspektif pragmatik untuk mengkaji kesantunan berbahasa dalam debat politik. Pendekatan kualitatif dipilih karena berorientasi pada pemahaman makna secara mendalam, kontekstual, dan interpretatif terhadap fenomena kebahasaan, bukan pada penghitungan angka. Penelitian bersifat deskriptif-komparatif, yakni menggambarkan serta membandingkan penggunaan strategi kesantunan antara Mahyeldi dan Epyardi dalam debat pemilihan gubernur Sumatera Barat tahun 2024. Data penelitian berupa tuturan kedua kandidat yang ditayangkan melalui kanal YouTube KPU Sumatera Barat pada 17 November 2024. Data primer berupa transkrip ujaran yang dianalisis berdasarkan prinsip kesantunan Geoffrey Leech dan konsep *kato nan ampek*, sedangkan data sekunder meliputi buku, jurnal, dan referensi ilmiah yang relevan dengan pragmatik, kesantunan, dan retorika politik.

Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai *key instrument* yang berperan dalam merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan melaporkan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyimakan rekaman debat, transkripsi verbatim, pencatatan dan klasifikasi tuturan berdasarkan kategori analisis, serta dokumentasi data. Keabsahan data diuji melalui ketekunan pengamatan dan peningkatan kredibilitas dengan membandingkan temuan dengan rujukan teoretis yang relevan. Analisis data dilakukan secara induktif dan berlangsung secara simultan sejak proses pengumpulan data, melalui tahap identifikasi strategi kesantunan, analisis register bahasa, interpretasi kontekstual, dan perbandingan temuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pola kesantunan kedua kandidat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kesantunan berbahasa menurut prinsip Geoffrey Leech mencakup enam maksim, yaitu kebijaksanaan, kedermawanan, penghargaan, kesederhanaan, pemufakatan, dan simpati. Seluruh tuturan dianalisis berdasarkan pemenuhan dan pelanggaran terhadap keenam maksim tersebut, dengan hasil yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Kesantunan Geoffrey Leech dari Tuturan Mahyeldi dan Epyardi Asda pada Debat Pilgub Sumatera Barat Tahun 2024

No	Maksim	Mahyeldi		Epyardi asda	
		Mematuhi	Melanggar	Mematuhi	Melanggar
1	Kebijaksanaan	7	1	-	5
2	Kedermawanan	-	2	-	3
3	Penghargaan	1	-	-	4
4	Kerendahan hati	-	2	-	5
5	Pemufakatan	1	-	-	6
6	Simpati	-	-	-	-
Total Tuturan		9	5	0	23

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 37 tuturan yang dianalisis berdasarkan enam maksim kesantunan Geoffrey Leech (1993), Mahyeldi lebih banyak mematuhi prinsip kesantunan, terutama pada maksim kebijaksanaan (enam tuturan). Sebaliknya, tidak ditemukan tuturan Epyardi Asda yang memenuhi keenam maksim tersebut; pelanggaran terbanyak terdapat pada maksim kebijaksanaan dan pemufakatan, sedangkan pada maksim simpati tidak ditemukan pematuhan maupun pelanggaran.

Maksim Kebijaksanaan

Maksim kebijaksanaan menuntut penutur memaksimalkan keuntungan bagi lawan tutur dan meminimalkan kerugian bagi pihak lain. Dalam debat, Mahyeldi menunjukkan kepatuhan terhadap maksim ini sebanyak enam tuturan, sedangkan satu tuturan dinilai melanggar. Sebaliknya, Epyardi Asda tidak ditemukan tuturan yang mematuhi maksim ini dan terdapat lima tuturan yang melanggar.

Tuturan Mahyeldi yang mematuhi maksim kebijaksanaan tampak pada kutipan seperti: *“Terima kasih, Pak Epy, barangkali...”*, *“Tidak semua masalah menjadi rumit...”*, *“Sabar, Pak Epy...”*, *“Ya, alhamdulillah...”*, dan *“Pak Epy perlu jujur pada diri sendiri.”* Penggunaan kata mitigatif seperti *barangkali*, ungkapan religius *alhamdulillah*, serta sapaan hormat menunjukkan upaya meredakan ketegangan dan menghindari serangan langsung. Namun, pada kutipan *“nyatanya belum selesai”*, Mahyeldi dinilai melanggar karena menonjolkan kegagalan lawan tutur sehingga berpotensi merugikan citra pihak lain.

Sebaliknya, tuturan Epyardi seperti *“jauh panggang dari api”*, *“hanya pandai berbicara”*, *“harusnya Bapak malu”*, *“panduto luar biasa”*, dan *“jawaban Bapak itu ngalor semua”* memaksimalkan kerugian bagi lawan tutur. Kritik disampaikan secara langsung tanpa mitigasi sehingga tidak memenuhi prinsip kebijaksanaan.

Maksim Kedermawanan

Maksim kedermawanan mengharuskan penutur meminimalkan keuntungan diri sendiri dan memaksimalkan keuntungan bagi orang lain. Dalam debat ini, tidak ditemukan tuturan yang mematuhi maksim kedermawanan, baik dari Mahyeldi maupun Epyardi. Pelanggaran ditemukan pada dua tuturan Mahyeldi dan tiga tuturan Epyardi.

Pelanggaran Mahyeldi tampak pada kutipan seperti: *"jauh di atas Kabupaten Solok"* dan *"jauh berbeda dengan Kabupaten Solok yang pernah dipimpin Pak Epy"*. Pernyataan ini menonjolkan keberhasilan diri dengan membandingkan capaian pihak lain secara implisit. Sementara itu, Epyardi melanggar melalui tuturan seperti: *"atas kerja anak saya"*, *"anggaran paling jelek se-Indonesia"*, dan *"kalau saya jadi gubernur..."*. Tuturan tersebut memperlihatkan pemaksimalan keuntungan diri serta perendahan terhadap pihak lain, sehingga tidak selaras dengan prinsip kedermawanan.

Maksim Penghargaan

Maksim penghargaan menuntut penutur meminimalkan celaan dan memaksimalkan pujian kepada orang lain. Mahyeldi menunjukkan satu tuturan yang mematuhi maksim ini, sedangkan pelanggaran tidak ditemukan. Epyardi tidak menunjukkan tuturan yang mematuhi dan terdapat empat pelanggaran.

Kepatuhan Mahyeldi tampak pada kutipan: *"Saya kira jawaban dari Pak Epy dan Ekos cukup baik."* Pernyataan ini mengandung apresiasi eksplisit terhadap lawan tutur sehingga memenuhi prinsip penghargaan. Sebaliknya, pelanggaran oleh Epyardi terlihat dalam kutipan seperti: *"pintar ngomong doang"*, *"intelektualitas sangat minim"*, *"hanya cocok jadi wali nagari"*, dan *"pendidikan Bapak sungguh pendek."* Tuturan-tuturan tersebut memaksimalkan celaan dan merendahkan harga diri lawan debat, sehingga tidak santun menurut maksim penghargaan.

Maksim Kerendahan Hati

Maksim kerendahan hati menuntut penutur meminimalkan pujian terhadap diri sendiri. Tidak ditemukan tuturan yang mematuhi maksim ini. Pelanggaran terjadi pada dua tuturan Mahyeldi dan lima tuturan Epyardi.

Pelanggaran Mahyeldi tampak pada kutipan seperti: *"kami berhasil membebaskan lahan..."* dan *"banjir telah selesai ditangani."* Pernyataan tersebut menonjolkan keberhasilan diri. Sementara itu, Epyardi menunjukkan pelanggaran lebih dominan melalui kutipan: *"saya satu-satunya orang yang membuat jalan nasional"*, *"Solok terbaik"*, *"anak saya yang membantu"*, dan *"investasi sangat luar biasa."* Penekanan pada capaian pribadi atau keluarga menunjukkan pemaksimalan pujian diri yang bertentangan dengan prinsip kerendahan hati.

Maksim Kesepakatan

Maksim kesepakatan menghendaki penutur memaksimalkan persetujuan dan meminimalkan pertentangan. Mahyeldi menunjukkan satu tuturan yang mematuhi maksim ini, sedangkan pelanggaran tidak ditemukan. Epyardi tidak menunjukkan kepatuhan dan terdapat enam pelanggaran.

Kepatuhan Mahyeldi tampak pada kutipan: “*Saya kira jawaban Pak Epy cukup baik.*” Tuturan ini menunjukkan penerimaan terhadap pendapat lawan. Sebaliknya, Epyardi melanggar melalui kutipan seperti: “*implementasinya 0*”, “*jawaban Bapak itu ngalor semua*”, “*tidak ada anggaran*”, dan “*Bapak tidak menjawab bunyi UU itu.*” Tuturan tersebut mempertegas pertentangan dan menolak pernyataan lawan secara langsung.

Maksim Simpati

Maksim simpati menuntut penutur memaksimalkan empati dan kepedulian terhadap pihak lain. Dalam sesi debat ini tidak ditemukan tuturan yang memenuhi maksim simpati, baik dari Mahyeldi maupun Epyardi. Hal ini dipengaruhi oleh konteks debat politik yang bersifat kompetitif dan konfrontatif, sehingga strategi komunikasi yang muncul lebih dominan berupa pembelaan diri dan serangan terhadap lawan dibandingkan ekspresi empati.

Kesantunan Pada Debat Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2024 Dikaji dari *Kato nan Ampek*

Untuk analisis *kato nan ampek*, jika dilihat dari usia kedua calon, yaitu Mahyeldi (lahir tahun 1963) dan Epyardi Asda (lahir tahun 1962), kedudukan keduanya tergolong setara. Oleh karena itu, secara hubungan tutur, tuturan mereka dapat dimasukkan ke dalam *kato mandata*, yakni cara berbicara antara pihak yang memiliki kedudukan sejajar. Namun, karena keduanya merupakan pemimpin, kepala daerah yang dihormati, dituakan, berdasarkan aturan kesantunan *kato nan ampek* bahasa yang digunakan hendaklah penuh rasa hormat, hal ini sesuai dengan prinsip *kato mandaki* dan *malereang*. Sebagai calon pemimpin Gubernur Provinsi Sumatera Barat dalam forum resmi debat publik, tuturan Mahyeldi dan Epyardi juga perlu dikaji dari semua *kato nan ampek*, untuk mengidentifikasi bagaimana karakter calon pemimpin berdasarkan kesantunan tuturannya. Sebanyak 12 tuturan Mahyeldi dan 13 tuturan Epyardi Asda dikelompokkan sesuai kategori *kato nan ampek*, kemudian dianalisis tingkat kesantunannya. Hasil analisis tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. Rekapitulasi kesantunan Kato Nan Ampek dari Tuturan Pasangan Calon Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024

No	Jenis Kato Nan Ampek	Mahyeldi		Epyardi Asda	
		Mematuhi	Melanggar	Mematuhi	Melanggar
1	Kato mandaki	5	1	-	11
2	Kato menurun	-	-	-	-
3	Kato malereang	6	-	-	2
4	Kato mandata	-	-	-	-
Total		11	1	0	13

Berdasarkan hasil analisis debat calon Gubernur Sumatera Barat putaran kedua tahun 2024, ditemukan dua bentuk utama *kato nan ampek*, yaitu *kato mandaki* dan *kato malereang*. Secara umum, Mahyeldi lebih dominan menggunakan tuturan yang selaras dengan prinsip kesantunan adat Minangkabau, sedangkan Epyardi Asda lebih banyak menampilkan tuturan yang bersifat konfrontatif. Adapun *kato manurun* dan *kato mandata* tidak ditemukan secara ideal karena konteks debat bersifat formal dan kedua kandidat berada dalam posisi setara.

Kato mandaki ditandai dengan penggunaan bahasa halus, berlapik, serta menjaga kehormatan lawan tutur. Mahyeldi menunjukkan kecenderungan menggunakan sapaan hormat seperti “Pak Epy”, ungkapan religius seperti “Alhamdulillah” dan “Insyaallah”, serta pronomina inklusif “kita” yang mencerminkan sikap merangkul. Selain itu, penggunaan kata mitigatif seperti “barangkali” dan “cukup baik” menunjukkan upaya meredam konfrontasi. Strategi ini sejalan dengan prinsip *raso jo pareso* dalam adat Minangkabau sebagaimana dikemukakan oleh A. A. Navis, yang menekankan keseimbangan antara nalar dan rasa dalam bertutur. Meskipun demikian, terdapat satu tuturan yang bernuansa kompetitif ketika membandingkan capaian investasi dengan daerah yang pernah dipimpin lawan debat, yang berpotensi menyinggung marwah lawan tutur.

Sebaliknya, tuturan Epyardi dalam kategori *kato mandaki* cenderung melanggar prinsip kesantunan karena memuat sindiran tajam, tudingan langsung, dan penilaian personal, seperti menyebut implementasi “nol” atau mempertanyakan kapasitas intelektual lawan. Gaya tutur yang frontal tersebut menunjukkan kurangnya strategi pelapisan bahasa yang menjadi ciri utama *kato mandaki*.

Dalam kategori *kato malereang*, Mahyeldi juga lebih banyak menunjukkan bentuk kritik tidak langsung melalui pertanyaan retorik dan pemaparan data secara argumentatif. Kritik disampaikan secara defensif tanpa diksi kasar, sehingga tetap menjaga formalitas debat. Sementara itu, tuturan Epyardi meskipun kadang diawali peribahasa atau pujian semu, tetap berujung pada serangan langsung yang melemahkan fungsi penghalusan makna dalam *kato malereang*. Secara keseluruhan, perbedaan strategi ini menunjukkan bahwa Mahyeldi lebih konsisten menjaga kesantunan budaya dalam debat, sedangkan Epyardi lebih mengedepankan gaya retorika konfrontatif yang berorientasi pada serangan personal.

Dampak Kesantunan Dalam Debat Pilgub Sumatera Barat Ditinjau dari Kolom Chat Live Youtube dan Hasil Pilkada Gubernur Sumatera Barat

Prinsip kesantunan sangat mempengaruhi cara pandang orang lain terhadap si penutur. Begitu juga semua tuturan yang digunakan 2 tokoh dalam debat pilgub Provinsi Sumatera Barat tersebut Mahyeldi dan Epyardi Asda menjadi perhatian oleh masyarakat baik yang menonton secara langsung maupun tidak langsung. Masyarakat ikut mengomentari 2 tokoh dalam kolom Youtube live. Data tersebut sebagai berikut :

Tabel 3. Komentar Masyarakat Dalam Kolom Live Youtube terhadap Mahyeldi dan Epyardi Asda Hasil Debat Pilgub Sumatera Barat

No	Komentar Masyarakat	Kesantunan	
		Mahyeldi	Epyardi Asda
1	@Laraulfahmi ; Sangat tempramental dan otoriter pak capt ni		x
2	@Ekosyafputra7261: Biasonyo buya.. petahana dimana ² pasti jadi sasaran empuk kandidat..tapi tetap tenang buya.. kami bukittinggi 98% tetap no 1	✓	
3	@Aidilekaputra ; 02 Kareh angok D Solok khususnya d kampung halamanku di Alahan panjang banyak pembangunan yg bersifat kepentingan pribadi dan keluarga nya sendiri,.. Adab berbicara pemimpin yg bisa masyarakat Sumatera Barat sudah terlihat,.Menyerang pribadi kandidat giliran diserang balik kok ngamuk,..		x
4	@Ani-g2v ; Astaghfirullah adab nya... Kok begitu.... Dg pejabat aja dia berani begitu apalagi sama rakyat jelata esok tu.... Giliran dia di senggol dia tak terima...🤔🤔		x
5	@MHKisah1990 : MasyaAllah Dari debat ini kita melihat, Buya Mahyeldi punya hati yang lapang. Meski dihina bertubi-tubi, beliau tetap menjawab dengan sabar dan data yang ada.	✓	
6	@RockyMuslim ; Pilih pemimpin yg mempunyai SIKAP. (Bukan kasar). Bukti mahyeldi punyo sikap yg pas dlm membangun padang (dulu terarah terukur) 01 rancak bana	✓	
7	@Rocky Muslim ; Buya mahyeldi-vasco Santun, berwibawa, berkarakter,dan mengayomi	✓	
8	@Asnicantik9509 ; Melihat hasil debat td yg punya gagasan buya,,pak epi asda emosi doang,		x
9	@Mfthkj5549 ; Semoga yang nonton bisa ambil positifnya, semoga bisa menilai dengan baik, mana pemimpin yang pantas memimpin Sumbar kedepannya. Dari gagasan dan melihat bagaimana adab calon pemimpinnya, kami pilih 01 mahyeldi-vasco	✓	

No	Komentar Masyarakat	Kesantunan	
		Mahyeldi	Epyardi Asda
10	@ani-g2v : Menit ke 1:30 astaghfirullah..lg lg istighfar mendengar dia bicara, betapa rendahnya adabnya.... Urang minang tu biasonyo kalau mangecek ado istilah mandaki, manurun, mandata, malereang.... Ko manggas se nyooo... Wkwkwk. Buya dan vasco sabar kolaborasi yg tepat pemimpin sumbar	✓	x
11	@nitaresturejeki8037; Jak itu lisan nyo k jadi pemimpin di ranah minang tu. Kok ada yg memilih 02 yo lah sasek bana nyo tu. Dari lisan nyo se lah tampak hati jo kapalo nyo busuak		x
12	@pertanianperkebunan : Paslon 02 ini etika nya kurang Cenderung menyerang pribadi paslon 01. Khususnya pembahasan mengenai tol Opini paslon 02 terlalu menggampangkan dalam penyelesaian jalan tol		x
13	@harifmansaputra-b1d : Ilmu tanpa akhlak tidak ada guna nya pak epi. Akhlak harus diutamakan, apalagi bapak menjadi pemimpin sumbar		x
14	@brianfarhan : nggak kebayang nih kl 02 jd pemimpin di sumbar yg jauh lebih kompleks dibandingkan Solok bagaimana jadinya dia menyelesaikan permasalahan dgn gaya bicaranya seperti itu, bagaimana dia berbicara dengan masyarakat yg lemah nantinya sedangkan dgn seorang tokoh seperti buya Mahyeldi sj terlihat tdk hormat debat itu memang boleh saling serang tapi cara dan bahasanya tetap harus santun dan beretika karena itu mencerminkan bagaimana cara dia memimpin nantinya		x
15	@baborsaimran2569 : Epyardi muncuang kasa		x

Berdasarkan tabel dan komentar masyarakat pada kolom live YouTube debat Pilgub Sumatera Barat 2024, hampir seluruh responden menilai bahwa kesantunan dalam berbicara merupakan hal yang sangat penting dan menjadi karakter wajib bagi seorang calon pemimpin. Hal ini tercermin dalam komentar akun @brianfarhan yang menyoroti gaya bicara salah satu kandidat yang dinilai kurang hormat serta mempertanyakan kemampuannya memimpin daerah yang lebih kompleks, dengan penegasan bahwa debat boleh saling menyerang, tetapi tetap harus santun dan beretika karena mencerminkan pola kepemimpinan. Kesantunan kedua tokoh juga dikaitkan dengan nilai *kato nan ampek*, sebagaimana disampaikan akun @ani-g2v yang menilai tuturan salah satu kandidat tidak mencerminkan prinsip *mandaki*, *manurun*, *mandata*, dan *malereang* dalam tradisi Minangkabau. Penilaian masyarakat tersebut selaras dengan hasil resmi Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat

yang menetapkan kemenangan pasangan Mahyeldi–Vasko dengan perolehan 77,12% (1.757.612 suara sah) di 19 kabupaten/kota, sementara pasangan Epyardi–Ekos memperoleh 22,88% (521.448 suara sah). Pandangan ini juga diperkuat oleh pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Muhammad Taufik, yang menyatakan bahwa karakter calon gubernur termasuk cara berbicara yang mencerminkan kesantunan sangat memengaruhi pilihan masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesantunan berbahasa menjadi salah satu faktor penting dalam membentuk preferensi politik masyarakat pada Pilgub Sumatera Barat 2024.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam debat calon Gubernur Sumatera Barat 2024 putaran kedua antara Mahyeldi dan Epyardi Asda ditemukan kepatuhan terhadap tiga dari enam maksim kesantunan Geoffrey Leech (1983), yaitu maksim kebijaksanaan (tujuh tuturan), maksim penghargaan (satu tuturan), dan maksim kesepakatan (satu tuturan). Tuturan Mahyeldi lebih dominan mematuhi maksim kebijaksanaan karena cenderung meminimalkan kerugian bagi lawan dan menghindari serangan personal, sedangkan pada tuturan Epyardi tidak ditemukan kepatuhan yang signifikan, bahkan cenderung melanggar maksim kesepakatan dan kerendahan hati melalui penonjolan diri serta kritik yang menjatuhkan. Tidak ditemukannya maksim kedermawanan, kerendahan hati (dalam bentuk kepatuhan), dan simpati menunjukkan bahwa debat politik lebih berorientasi pada pembentukan citra dan penguatan posisi daripada menjaga harmoni tutur. Temuan ini sejalan dengan sejumlah penelitian sebelumnya tentang debat politik yang memperlihatkan bahwa pelanggaran kesantunan kerap terjadi ketika penutur lebih memaksimalkan keuntungan diri dan meminimalkan keuntungan pihak lain.

Dalam konteks budaya Minangkabau, kesantunan debat tidak hanya dapat diukur melalui teori pragmatik Barat, tetapi juga melalui nilai adat *kato nan ampek* yang menekankan penggunaan bahasa berlapik dan penuh pertimbangan sosial. Debat Pilgub Sumatera Barat memperlihatkan dominasi *kato mandaki* dan *kato malereang*, terutama melalui penggunaan bahasa kiasan seperti “jauh panggang dari api”, ungkapan religius, serta strategi sindiran halus yang mencerminkan falsafah “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah”. Hal ini sejalan dengan pandangan A. A. Navis yang menegaskan bahwa penggunaan bahasa dalam masyarakat Minangkabau sangat dipengaruhi hubungan sosial penutur dan mitra tutur. Dengan demikian, kesantunan dalam debat tidak hanya membentuk citra retorik, tetapi juga memengaruhi penilaian publik, karena cara bertutur seorang calon pemimpin menjadi representasi etika, karakter, dan legitimasi moralnya di hadapan masyarakat.

PENUTUP / KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis debat Pilgub Sumatera Barat 2024 antara Mahyeldi dan Epyardi Asda, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip kesantunan menurut Geoffrey Leech hanya memenuhi tiga dari enam maksim, yaitu maksim kebijaksanaan, penghargaan, dan pemufakatan. Ditemukan sembilan tuturan yang mematuhi prinsip kesantunan dan dua puluh delapan tuturan yang melanggar, dengan pelanggaran dominan pada maksim kebijaksanaan dan kerendahan hati karena penutur cenderung memaksimalkan keuntungan diri serta merendahkan lawan debat. Mahyeldi

lebih banyak menunjukkan kepatuhan, terutama pada maksim kebijaksanaan, sedangkan pada tuturan Epyardi tidak ditemukan kepatuhan yang signifikan. Dalam perspektif budaya Minangkabau, penerapan *kato nan ampek* memperlihatkan dominasi *kato mandaki* dan *kato malereang*, dengan kepatuhan lebih banyak ditunjukkan oleh Mahyeldi melalui bahasa yang sopan dan tidak menyerang secara langsung, sementara Epyardi lebih sering menggunakan sindiran yang bersifat menjatuhkan sehingga melanggar nilai kesantunan adat.

Temuan ini menegaskan bahwa kesantunan berbahasa berpengaruh terhadap pembentukan citra, persepsi publik, dan legitimasi moral calon pemimpin. Integrasi teori kesantunan universal dengan nilai lokal *kato nan ampek* memberikan kerangka analisis yang saling melengkapi dalam memahami strategi komunikasi politik di Sumatera Barat. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa kesantunan dan ketidaksantunan merupakan strategi komunikatif dalam membangun identitas dan relasi kekuasaan. Secara praktis, hasil penelitian ini berimplikasi pada pentingnya pendidikan karakter berbasis kesantunan di sekolah, pemanfaatan materi debat sebagai pembelajaran pragmatik oleh guru, serta pengembangan penelitian lanjutan yang mengintegrasikan pendekatan budaya dan analisis komunikasi politik secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, I. (2018). *Pragmatik*. Surabaya: Pena Salsabila
- Aisyah, E. N., Hardika, & Yuniawatika. (2019). *Kesantunan di dunia pendidikan*. Malang: Universitas Negeri Malang
- Alpetoti, M. A. (2022). *Etika Kato Nan Ampek dalam Budaya Minangkabau* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ushuluddin, Program Studi Aqidah Filsafat Islam). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Arum, Imam Mas, Riyadi Santosa, Sumarlam, dan Marwanto. 2020. "Pelanggaran Kesantunan Berbahasa Politisi dalam Kontroversi Ancaman People Power Pascapilpres." *Jurnal Bahasa dan Sastra* 11(2): 141–152.
- Candra, Khakikiyatul Dwi, Maskub, & Lestari, Laila Tri. 2020. *Kesantunan Berbahasa pada Debat Publik Pilbup Kabupaten Gresik Tahun 2020*. Lamongan: Universitas Islam Darul 'Ulum
- Chaer, A., & Agustina, L. (2004). *Sosiolinguistik: Perkenalan awal*. Jakarta: Rineka Cipta
- Fikri Hasnul, F., & Tarif. (2022). Bentuk dan fungsi makna register komunitas pecinta aquascape di Rokan Hulu. *Jurnal Akrab Juara*, 7(1), 12–22. Diakses 27 November 2024.
- Hadi, I. (2017). Register pedagang buah: Studi pemakaian bahasa kelompok profesi di Kota Padang. *Jurnal Metalingua*, 15(1), 25–40.
- Halliday, M. A. K. (1970). Language structure and language function. In J. Lyons (Ed.), *New horizons in linguistics* (pp. 140–165). Harmondsworth: Penguin.
- Halliday, M. A. K. (1978). *Language as social semiotic: The social interpretation of language and meaning*. London: Edward Arnold.

- Hasanah, A., Abdul Aziz, dan Hemas Haryas Susetya. 2023. "Kesantunan Berbahasa pada Dialog Debat Presiden 2024 serta Relevansinya terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA." *Teaching and Learning Journal of Mandalika* 5(2).
- Keraf, G. (1991). *Diksi dan gaya bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Leech, G. N. (1983). *Principles of pragmatics*. London: Longman.
- Lubis, C. N., & Baroroh, H. E. (2024). Kajian pragmatik kesantunan berbahasa dalam debat kelima calon presiden Indonesia 2024. *Jurnal IAIN Ambon*, 6(2), 190–207.
- Lyons, J. (1970). *Introduction to theoretical linguistics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Marni, S., & Adrias, L. R. (2021). *Buku ajar pragmatik*. Purbalingga: Eureka MediaAksara.
- Malabar, S. (2015). *Sosiolinguistik*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Nababan, P. W. J. (1984). *Sosiolinguistik: Suatu pengantar*. Jakarta: Gramedia.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: CV Harva Creative
- Navis, A. A. 1986. *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: PT Pustaka Grafitipers
- Nuryani, N., Isnaniah, S., & Eliya, I. (2021). *Sosiolinguistik dalam pengajaran bahasa berbasis multikultural: Teori dan praktik penelitian* (Ed. S. Hudaya). Bogor: IN MEDIA. ISBN: 978-623-7218-49-4
- Rahardi, R. K. (2019). *Pragmatik: Konteks intralinguistik dan konteks ekstralinguistik*. Yogyakarta: Amara Books
- Rahmat, Wahyudi, dan Maryelliwati. 2018. *Minangkabau (Adat, Bahasa, Sastra, dan Bentuk Penerapan)*. Padangpanjang: Institut Seni Indonesia Padangpanjang. <http://repository.isi-padangpanjang.ac.id/id/eprint/565>
- Reihan, Muhammad, Gusnetti, Wanda Maharani, dan Zahran Ulina. 2023. "Etika Kato Nan Ampek dalam Budaya Minangkabau sebagai Pedoman dalam Berkomunikasi." *Jurnal JILP (Jurnal Ilmiah Langue and Parole)* 7(1).
- Siswono, S. (2014). *Teori dan praktik (diksi, gaya bahasa, dan pencitraan)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Srisaparmi, & Fitriasia, A. (2024). Nilai filsafat *Kato Nan Ampek* dalam komunikasi masyarakat Minangkabau. *Journal of Education Search*, 5(2), 123–130